

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA
MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
DENGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI
VARIABEL PEMODERASI PADA KABUPATEN/KOTA
PROPINSI SUMATERA UTARA**

Dwi Saraswati, S.Pd, M.Si

Dosen Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Pembangunan Panca Budi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Transfer Antar Pemerintah dan Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan untuk menguji pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebagai variabel moderating. Populasi penelitian ini terdiri dari 33 kabupaten / kota (25 Kabupaten dan 8 Kota) di Provinsi Sumatera Utara, dianalisis 3 tahun. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Produk Domestik Bruto (PDB) berdasarkan harga konstan untuk melihat Perkembangan Ekonomi Daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara, realisasi Pendapatan Asli Daerah, Transfer Antar Pemerintah, Belanja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kinerja keuangan. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Berganda dan uji residual. Hasilnya terbukti bahwa Pendapatan Asli Daerah, Transfer Antar Pemerintah, dan Pengeluaran Pemerintah Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Hasil reserch ini menemukan, bahwa sebagian Pendapatan Daerah saja, dan Transfer Antar Pemerintah secara signifikan mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Oleh karena itu uji residual menunjukkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah tidak memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Transfer Antar Pemerintah dan Belanja Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Transfer Antar Pemerintah, Belanja Pemerintah Daerah, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dan juga merupakan masalah perekonomian dalam jangka panjang menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Melalui peraturan dan perundang-undangan, pemerintah mencoba melakukan desentralisasi fiskal dalam bentuk otonomi daerah yang dianggap sebagai solusi alternatif dalam mengatasi permasalahan tersebut. Bank Dunia (2009) menyebutkan bahwa antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi mempunyai kemungkinan kondisi sebagai berikut: (1) desentralisasi fiskal akan meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan; (2) desentralisasi fiskal mempunyai dampak meningkatkan instabilitas makro ekonomi sehingga berdampak negatif terhadap pertumbuhan; (3) desentralisasi fiskal untuk suatu daerah bisa berdampak positif ataupun negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal tersebut tergantung kesiapan kelembagaan daerah tersebut dalam menjalankan kebijakan desentralisasi fiskal.

Kebijakan terkait otonomi tertuang dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dalam perkembangannya diperbarui dengan dikeluarkannya UU No.32 tahun 2004. Pelaksanaan kebijakan tentang otonomi daerah di Indonesia dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, yang juga mengacu pada UU No.25 tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No.33 tahun 2004 mengenai pembagian kewenangan dan fungsi (*power sharing*) antara pemerintah pusat dan daerah mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah yaitu pengaturan pembagian sumber-sumber daya keuangan (*financial sharing*) antara pusat dan daerah sebagai konsekuensi dari adanya pembagian kewenangan tersebut.

Kondisi ini membawa implikasi pada pelimpahan kewenangan antara pusat dan daerah dalam berbagai bidang. Otonomi daerah menimbulkan desentralisasi yang menyangkut pengelolaan keuangan

daerah, perencanaan ekonomi (termasuk menyusun program-program pembangunan daerah) dan perencanaan lainnya yang dilimpahkan dari pusat ke daerah.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam mengatur sumber daya yang ada, mengurus sendiri urusan pemerintah menurut azas otonomi daerah, yang diarahkan untuk mempercepat tercapainya pertumbuhan ekonomi hingga terciptanya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta semua masyarakat untuk kemajuan dan kemakmuran bersama.

Pada tahap implementasi otonomi diperlukan dana yang besar. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah.

Salah satu sumber pendapatan daerah yang tercermin dalam APBD adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri. Secara teoritis pengukuran kemandirian daerah diukur dari PAD, yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Melalui PAD daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah yang digali dari dalam wilayah daerah bersangkutan. Masalah yang sering muncul adalah rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan prediksi penerimaan daerah yang sangat akurat sehingga belum dapat dipungut secara optimal.

Melalui undang-undang No. 33 tahun 2004 kemampuan daerah untuk memperoleh dana seharusnya dapat ditingkatkan. Peningkatan PAD yang dianggap sebagai modal yang bersumber dari daerah secara akumulasi seharusnya akan lebih menimbulkan eksternalisasi yang bersifat positif dan memberikan kontribusi yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi

Pada realisasinya Ditjen Perimbangan Keuangan (DJP, 2011) menemukan secara nasional PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah sebesar 17%. Untuk mengatasi ketimpangan permasalahan tersebut, pemerintah pusat mentransfer Dana Perimbangan untuk masing-masing daerah yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi.

Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Komitmen Pemerintah untuk melaksanakan kebijakan desentralisasi sebagai upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan telah terlihat dengan jelas dan baik melalui kenaikan dana transfer ke daerah dari tahun ke tahun. Untuk Propinsi Sumatera Utara perkembangan jumlah pendapatan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat dari tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Utara 2012-2014 (000)

Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	Total
2012	2.247.485.635	12.952.914.112	622.376.738	15.822.776.485
2013	3.536.342.152	15.343.227.066	1.212.876.246	20.092.445.464
2014	5.112.121.158	16.525.278.980	1.841.258.028	23.478.658.166
Share(%)	19	75	6	100

Sumber: Ditjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu (diolah).

Dari angka tersebut jelaslah bahwa daerah masih tergantung pada dana perimbangan guna menjalankan berbagai program dan kegiatan pembangunannya. Dana perimbangan merupakan komponen terbesar dalam alokasi transfer ke daerah, serta masih mendominasi dari jumlah pendapatan daerah. Dana perimbangan memiliki peranan yang sangat penting bagi keuangan daerah, terutama dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2012-2014), proporsi dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah di Propinsi Sumatera Utara mencapai rata-rata 75%. Dalam hal tersebut terlihat jelas bahwa, pemerintah terus melakukan perbaikan secara terus menerus terhadap mekanisme penyaluran transfer ke daerah. Namun pada kenyataannya meningkatnya pendapatan daerah tidak selalu berimbang pada meningkatnya pertumbuhan daerah.

Berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, secara umum model pertumbuhan ekonomi menurut Rostow (1996) menjelaskan bahwa salah satu unsur pertumbuhan ekonomi adalah pembentukan modal berupa mesin-mesin, jalan raya dan infrastruktur lainnya.

Secara teoritis Keynesian menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi salah satunya ditentukan oleh besarnya pengeluaran pemerintah (Sukirno, 2005). Sejalan dengan itu, menurut Sitaniapessy (2013), pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah pertumbuhan yang ditopang oleh investasi pemerintah sebagai salah satu bentuk pengeluaran pemerintah.

Pertumbuhan yang ditopang oleh investasi dianggap akan dapat meningkatkan produktivitas sehingga membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Investasi pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tercermin melalui belanja modal yang dianggarkan setiap tahunnya (Wahyuningsih, 2011). Hal ini tentunya akan berdampak terhadap penyediaan sarana fisik dan prasarana yang memadai bagi daerah kabupaten dan kota tersebut.

Lebih jelas, menurut Sodik (2007) hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah, atau lebih umumnya adalah ukuran dari sektor publik, adalah pengeluaran pemerintah dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Pengeluaran pemerintah pada sektor publik ini dapat dilihat dari jumlah belanja modal yang terdapat di realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah di masing-masing daerah.

Belanja modal yang merupakan salah satu bentuk pengeluaran pemerintah dan terdapat dalam struktur APBD ini meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan serta belanja modal fisik lainnya (BPS, 2009).

Menurut Abdullah (2013), belanja modal adalah komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan *output* berupa aset tetap. Dalam pemanfaatan aset tetap yang dihasilkan tersebut, ada yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik atau dipakai oleh dan ada yang tidak langsung dimanfaatkan oleh. Pada kenyataannya beberapa proyek fisik menghasilkan *output* berupa bangunan yang sepenuhnya dinikmati oleh aparatatur atau satuan kerja yang tidak berhubungan langsung dengan fungsi pelayanan publik.

Proporsi yang tidak tepat ini akan dapat menggeser tujuan dari belanja modal itu sendiri dalam perspektif kebijakan publik, sebagian besar belanja modal seharusnya berhubungan dengan pelayanan publik yang lebih diarahkan kepada pembangunan infrastruktur yang digunakan oleh daerah.

Bertambahnya infrastruktur dan perbaikannya oleh pemerintah daerah diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui fungsi dari belanja modal tersebut pada setiap anggaran tahunan jumlahnya semestinya relatif besar.

Dari data BPS secara nasional menunjukkan bahwa total belanja daerah mengalami peningkatan sebesar 83% dari tahun 2007 sampai tahun 2011 yang kemungkinan besar disebabkan karena makin banyaknya jumlah daerah, disamping alasan logis bertambahnya kebutuhan pemerintah daerah.

Peningkatan porsi belanja daerah secara nasional tersebut, berbanding terbalik dengan porsi belanja modal yang terus mengalami penurunan yang cukup tajam. Untuk Propinsi Sumatera Utara perkembangan jumlah belanja modal dalam 3 (tiga) tahun terakhir, jika di bandingkan dengan total belanja daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Jenis Belanja Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2012-2014 (000)

Keterangan	2012	2013	2014
Belanja Rutin	2.949.200.552	3.548.085.286	6.827.451.955
Belanja Modal	716.805.622	1.063.237.377	803.607.598
Belanja Tak terduga	700.000	1.545.000	2.574.957
Total Belanja Daerah	3.666.706.174	4.611.477.163	7.633.634.510

Sumber : Perimbangan Keuangan, Kemenkeu (diolah).

Dilihat dari tabel diatas jika diamati porsi belanja daerah untuk Provinsi Sumatera Utara terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, namun untuk belanja modal terlihat penurunan yang cukup signifikan dari tahun anggaran 2013 ke tahun 2014, dimana pada tahun 2013 belanja modal mendapat porsi 23,05% dari total belanja daerah, namun pada tahun 2014 belanja modal mengalami penurunan yang cukup tajam, yaitu hanya mendapatkan 10,52% dari total belanja daerah, atau turun sekitar 12,52%.

Penelitian tentang PAD terhadap pertumbuhan ekonomi diantaranya pernah dilakukan oleh Setyawati & Hamzah (2007), dan Maryati (2010) menyatakan PAD berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan penelitian yang dilakukan Santosa (2013) menemukan bahwa PAD tidak berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi.

Untuk penelitian dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi diantaranya pernah dilakukan oleh Mansim (2010) menemukan bahwa dana perimbangan dalam proksi dana bagi hasil tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, namun penelitian yang dilakukan oleh Rinawaty dkk (2009) membuktikan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan penelitian tentang belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi diantaranya pernah dilakukan oleh Anasme (2007), dan Putra (2010) menemukan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, namun penelitian yang dilakukan oleh Sularso dan Restianto (2011), membuktikan bahwa alokasi belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ketidak konsistenan penelitian yang dilakukan oleh Setyawati & Hamzah (2007), Maryati (2010), Santosa (2013), Mansim (2010), Rinawaty dkk (2009), Anasme (2007), Putra (2010), serta Sularso dan Restianto (2011) mengenai pengaruh PAD, dana perimbangan, dan belanja modal memotivasi peneliti untuk kembali melakukan penelitian tersebut.

Peneliti menduga hasil penelitian yang tidak konsisten tersebut disebabkan oleh dibutuhkan variabel lain yang seharusnya dapat memperkuat hubungan PAD, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah.

Anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas pemerintah daerah. Anggaran daerah dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan, alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang, yang merupakan ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas di berbagai unit kerja.

Anggaran sebagai instrumen kebijakan dan menduduki posisi sentral harus memuat kinerja, baik untuk penilaian secara internal maupun keterkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai fokus utama.

Pemantauan pendekatan kinerja dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan *outcome* yang diharapkan dari kegiatan dan program harus menjadi perhatian. Terbukti pada tahun 2003, pemerintah menerapkan manajemen pengelolaan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja (*Performance Based Budget*) sebagai sebuah sistem baru yang secara resmi diatur dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 dan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 pada pasal 3 ayat 1, keuanganan Negara harus dikelola secara efektif dan efisien.

Anggaran pemerintah daerah berbasis kinerja merupakan salah satu tuntutan dari pembentukan pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

Dalam manajemen pemerintahan, khususnya pemerintah daerah, kemampuan mengelolah sumber-sumber daya lokal yang terbatas merupakan suatu syarat bagi keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah.

Secara teoritis peningkatan pendapatan daerah, dan implimentasi belanja modal yang dialokasikan pada pembiayaan pembangunan yakni infrastruktur publik berupa sarana ekonomi publik, ekonomi produktif, dan pengembangan ekonomi lokal daerah akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah dengan kinerja keuangan daerah yang baik, yang menunjukkan keberhasilan pengelolaan sumber-sumber pendapatan keuangan daerah.

Seiring dengan laju perkembangan pemekaran wilayah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang begitu pesat, sampai tahun 2009 jumlah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara telah bertambah jumlahnya menjadi 33 kabupaten/kota yang terdiri dari 25 kabupaten dan 8 kota.

Propinsi Sumatera Utara juga diberikan kewenangan untuk mengelolah keuangan daerahnya yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi didaerahnya. Setiap kabupaten/kota memiliki anggaran pendapatan dan belanja daerah sendiri yang dapat menciptakan kemandirian daerahnya menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal berpengaruh, baik secara simultan maupun parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kab/Kota di Propinsi Sumatera Utara?
2. Apakah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah memoderasi pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kab/Kota di Propinsi Sumatera Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal berpengaruh, baik secara simultan maupun parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kab/Kota di Propinsi Sumatera Utara?
2. Untuk mengetahui apakah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dapat memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kab/Kota di Propinsi Sumatera Utara?

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri. pendapatan asli daerah merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah. Menurut Santosa (2013) ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi, yaitu terletak pada kemampuan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan mengandalkan sumber pendapatan dari daerahnya sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Menurut Permendagri No.32 Tahun 2008, dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, kepada daerah diberikan Dana Perimbangan melalui APBN yang bersifat transfer dengan prinsip *money follows function*. Salah satu tujuan pemberian dana perimbangan tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah.

Menurut Santosa (2013) salah satu tujuan instrument fiskal dari dana perimbangan yaitu dapat memperluas basis ekonomi diberbagai sektor dan secara luas dapat memperluas lapangan usaha, yang pada akhirnya berdampak pada terstimulusnya pertumbuhan ekonomi daerah.

PP Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah menjelaskan pengertian belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

PSAP 02 tentang laporan anggaran berbasis kas mengklasifikasikan belanja modal dalam enam kelompok yaitu:

1. Belanja tanah;
2. Belanja peralatan dan mesin;
3. Belanja gedung dan bangunan;
4. Belanja jalan, irigasi dan jaringan;
5. Belanja aset tetap lainnya;
6. Belanja aset lainnya;

Pengertian belanja modal menurut Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap

berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.91/PMK.06/2007 tentang bagan akun standar (BAS) menyebutkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja maupun untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, bukan untuk dijual.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002, belanja modal dibagi menjadi:

1. Belanja pelayanan publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum.
2. Belanja aparatur daerah, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur.

Menurut Perdirjen Perbendaharaan tersebut, suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila:

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas.
2. Pengeluaran tersebut melebihi bayas minimum kapasitas aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan atau alokasi biaya. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran (Agustina, 2013).

Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Wood (1998) mengungkapkan bahwa fungsi dari pengukuran kinerja dapat menjelaskan mengenai (1) Evaluasi bagaimana program tersebut berjalan; (2) Sarana perbandingan atas pelayanan yang diberikan; (3) Alat komunikasi dengan publik. Menurut Sriwahyuni (2008) *performance budget* pada dasarnya adalah system penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja.

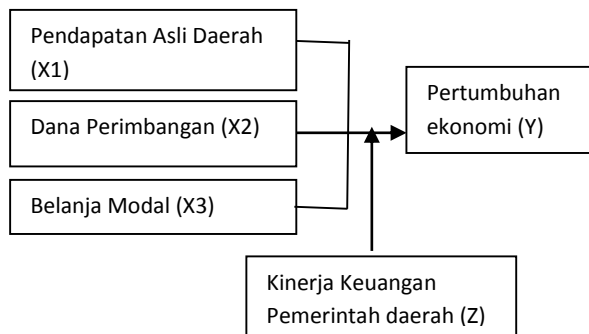
Dalam menejemen pemerintahan, khususnya pemerintah daerah, kemampuan mengelola sumber-sumber daya lokal yang terbatas merupakan suatu syarat bagi keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah, hal tersebut menjadi penting mengingat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berarti harus melaksanakan pembangunan sering kali masih diwarnai dengan fenomena pemborosan dan pengadaan program-program yang tidak sesuai dengan permasalahan yang rill di daerah (Mardiasmo, 2009).

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur prestasi ekonomi suatu wilayah. Dalam kegiatan ekonomi sebenarnya, pertumbuhan ekonomi merupakan berkembangnya ekonomi fisik. Beberapa perkembangan ekonomi fisik yang terjadi dalam suatu wilayah adalah penambahan produksi barang dan jasa serta perkembangan infrastuktur.

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang pada umumnya digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi di suatu negara. Sedangkan untuk tingkat wilayah propinsi maupun kabupaten/kota, digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara teori dapat dijelaskan bahwa PDRB merupakan bagian dari PDB, sehingga dengan demikian perubahan yang terjadi di tingkat regional akan berpengaruh terhadap PDB atau sebaliknya. Berdasarkan latar belakang penelitian dan landasan teori, maka kerangka konsep penelitian terlihat pada gambar sebagai berikut:

B. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini terdapat kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian

C. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut; (1) pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal berpengaruh baik secara simultan maupun parsial terhadap pertumbuhan ekonomi daerah; dan (2) kinerja keuangan pemerintah daerah dapat memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB III METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kausal yang berguna untuk menganalisis hubungan antar satu variabel dengan variabel lainnya.

B. POPULASI DAN SAMPEL

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi APBD kabupaten/kota yang terdapat di Propinsi Sumatera Utara dengan jumlah populasi penelitian sebanyak 33 kabupaten/kota (25 kabupaten dan 8 kota).

C. JENIS DAN SUMBER DATA

Data diperoleh dari diperoleh dari lembaga atau instansi yang terkait seperti laporan tahunan yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara.

Data yang digunakan adalah pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal, kinerja keuangan pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah (anggaran pendapatan dan belanja daerah) pada tahun anggaran 2012 – 2014.

D. METODE ANALISIS DATA

Pengujian hipotesis dilakukan analisis regresi linier berganda dengan uji residual untuk menguji moderasi antara variabel independen dan dependen.

E. DEFINISI OPERASIONAL DAN METODE PENGUKURAN VARIABEL

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

	Definisi Operasional	Indikator	Skala Ukur
Variabel Dependen			
Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Y)	PPertumbuhan Ekonomi Daerah adalah proses peningkatan produk barang dan jasa yang diukur dengan melihat nilai PDRB berdasarkan harga konstan.	Nilai PDRB atas dasar harga konstan pada kabupaten/kota di Sumatera Utara tahun 2010-2012	Rasio
Variabel Independen			
Pendapatan Asli Daerah (X1)	Total penerimaan daerah yang bersumber dari daerah, terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan	Realisasi PAD Kab/Kota di Sumatera Utara dari tahun 2010-2012	Rasio

	asli daerah yang sah yang digunakan untuk membiayai kegiatan daerah.		
Dana Perimbangan (X2)	Dana perimbangan adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk membantu pembiayaan kegiatan daerah. Dana perimbangan terdiri dari DBH, DAU, dan DAK.	Realisasi dana perimbangan Kab/kota di Sumatera Utara tahun 2010-2012	Rasio
Belanja Modal (X3)	Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang terdiri dari pengeluaran untuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset lainnya	Realisasi belanja modal Kab/Kota di Sumatera Utara tahun 2010-2012	Rasio
Variabel Moderating			
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (X4)	Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan hasil perbandingan antara realisasi pengeluaran dan realisasi penerimaan dengan menggunakan ukuran efisiensi.	Efisiensi = $\frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$	Rasio

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan data penelitian yang telah dikumpulkan, maka diperoleh data deskripsi statistik sebagai berikut.

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1_PAD	99	1.057.429	1.147.120.000	54.504.534	161.085.746
X2_Dana Perimbangan	99	99.301.761	1.817.190.000	485.278.927	272.870.624
X3_Belanja Modal	99	16.833.467	758.429.000	139.274.268	102.818.429
Z_Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	99	75,93	115,35	97,17	69,48
Y_Pertumbuhan Ekonomi Daerah	99	165	41.519	38.418	6.883
Valid N (listwise)	99				

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menganalisis pengaruh PAD, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dengan kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai variabel moderating. Uji Hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari 4 yaitu koefisien determinasi (R^2), uji statistik t, uji statistik F, dan uji residual (*moderating*).

Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen mempengaruhi variabel dependen maka akan dilihat Adjusted *R Square* pada tabel berikut.

Tabel 4.2. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.871 ^a	.759	.752	.237228

Sumber: Hasil Analisis

Nilai *Adjusted R Square* diperoleh sebesar 0,752 atau 75,2%. Hal ini berarti variabel dependen (pertumbuhan ekonomi) dapat dijelaskan oleh variabel independen (PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja modal) sebesar 75,2%. Sedangkan sisanya 0,248 atau 24,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Uji Statistik t

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya secara parsial maka digunakan Uji-t.

Tabel 4.3. Hasil Uji Statistik t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	-11.316				
PAD	.314	1.267	.312	3.727	.000
Dana Perimbangan	1.684	.243	.713	6.918	.000
Belanja Modal	-.277	.160	-.143	-1.737	.086

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel diatas yang merupakan jawaban dari hipotesis 1, dengan menggunakan taraf signifikan $\alpha = 5\%$ maka secara parsial pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dapat disimpulkan bahwa:

1. Signifikansi variabel pendapatan asli daerah dalam pertumbuhan ekonomi daerah adalah $0.000 < 0.05$ maka secara parsial variabel ini berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Signifikansi variabel dana perimbangan dalam pertumbuhan ekonomi daerah adalah $0.000 < 0.05$ maka secara parsial variabel ini berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Signifikansi variabel belanja modal dalam pertumbuhan ekonomi daerah adalah $0.086 < 0.05$ maka secara parsial variabel ini tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Dari uraian di atas maka dengan demikian dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = -11.316 + 0.314 X_1 + 1.684 X_2 - 0.277 X_3 + e$$

Model persamaan regresi berganda tersebut bermakna:

1. Nilai konstanta sebesar -11.316 artinya apabila variabel PAD (X_1), dana perimbangan (X_2), belanja daerah (X_3), dianggap nol, maka nilai pertumbuhan ekonomi (Y) sebesar -11.316.
2. Variabel X_1 (PAD) mempunyai nilai koefisien positif sebesar 0.314 artinya setiap penambahan 1% PAD akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 31%.
3. Variabel X_2 (dana perimbangan) mempunyai koefisien positif sebesar 1.684 artinya setiap penambahan 1% dana perimbangan akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 168,4 %.
4. Variabel X_3 (belanja daerah) mempunyai koefisien negatif sebesar -0.277 artinya setiap penambahan 1% belanja daerah akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 27%

Uji Statistik F

Pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen dapat diketahui dengan melihat nilai dari *level of significant* pada tabel *Anova* dengan alpha 5 %.

Tabel 4.4. Uji Statistik F

ANOVA ^b						
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	16.872	3	5.624	99.932	.000 ^a
	Residual	5.346	95	.056		
	Total	22.218	98			

Dengan menggunakan taraf signifikansi $\alpha = 5\%$ maka dapat dilihat secara simultan PAD, dana perimbangan, dan belanja modal berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dilihat dari nilai sig sebesar $0,000 < \text{nilai } \alpha \text{ sebesar } 0,05$.

Uji Residual (*Moderating*)

Uji residual (*Moderating*) ini merupakan pengujian hipotesis kedua, yang fokusnya adalah ketidakcocokan (*lack of fit*) yang ditunjukkan oleh nilai residual di dalam regresi, dengan ditandai hasil uji signifikansi $<$ dari nilai α sebesar 0.05 dan mempunyai koefisien negatif. Persamaan uji residual ini menggambarkan apakah variabel kinerja keuangan daerah merupakan variabel moderating. Jika koefisien untuk variabel moderating hasilnya negatif dan signifikan maka variabel kinerja keuangan daerah merupakan variabel pemoderasi, sebaliknya jika positif atau tidak signifikan maka variabel kinerja keuangan bukan merupakan variabel moderating.

Tabel 4.5. Uji Residual Persamaan 1

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.723	.158		10.926	.000
X1	.013	.010	.190	1.228	.222
X2	-.035	.030	-.218	-1.143	.256
X3	.058	.020	.446	2.921	.004

a. Dependent Variable:

Z

Sumber: Hasil Analisis.

Pengujian persamaan 1 untuk memperoleh angka residual persamaan [e]. Selanjutnya nilai absolut residual tersebut digunakan sebagai variabel dependen pada persamaan 2. Hasil dari pengujian pada persamaan 2 dapat dilihat pada tabel 9.

Berdasarkan hasil uji residual pada tabel 8 dan tabel 9 maka diperoleh persamaan residual sebagai berikut:

$$Z = 1.723 + 0.013 X1 - 0.035 X2 + 0.058 X3 + e \quad (1)$$

$$[e] = 0.037 - 0.004 Y \quad (2)$$

Tabel 4.6. Uji Residual Persamaan 2

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.037	.013		2.729	.008
Y	-.004	.004	-.112	-1.112	.269

a. Dependent Variable:

Abresid

Sebuah variabel dapat menjadi variabel moderating apabila nilai sig < dari nilai α sebesar 0.05, sebaliknya nilai sig > dari nilai α sebesar 0.05 maka variabel tersebut tidak dapat menjadi variabel moderating.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa variabel kinerja keuangan daerah mempunyai nilai sig sebesar 0,269 > nilai α sebesar 0,05 dan mempunyai nilai koefisien yang negatif, sehingga dapat diartikan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah bukan merupakan variabel moderating yang dapat memperkuat hubungan antara pendapatan asli daerah, dana perimbangan dengan pertumbuhan ekonomi

BAB V KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian terhadap hipotesis yang disusun, sebagaimana telah dibahas maka kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengujian secara simultan menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal, memberikan pengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Pengujian secara parsial, maka hanya pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Pengujian variabel pemoderasi menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah yang kurang efisien tidak dapat memoderasi hubungan pendapatan asli daerah, dana perimbangan dengan pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Propinsi Sumatera Utara pada tahun pengamatan 2010-2012.

Keterbatasan antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian ini mencoba menganalisis komponen APBD namun hanya terbatas pada PAD, dana perimbangan, dan belanja modal. untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel lain yang berasal dari komponen APBD sehingga diharapkan dapat memberikan model penelitian yang lebih baik.
2. Penelitian berfokus pada kinerja keuangan pemerintah yang diukur dengan rasio efisiensi, sehingga hanya faktor kuantitatif atas pengaruh komponen APBD saja yang terlihat, dan belum meneliti faktor kualitatif sehingga belum dapat diketahui efektivitas komponen dalam APBD tersebut.

Penelitian menggunakan data 3 tahun periode pengamatan disarankan menggunakan periode pengamatan dengan rentang waktu lebih banyak, sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih representatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy. 2013. *Belanja Modal dan Perubahan APBD*. http://syukriy.wordpress.com/2013/11/01/belanja-modal-dan-perubahan_apbd/, 22 Januari 2014.
- Agustina, Oesi, A, 2012. Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011). *Jurnal Keuangan*. Vol. 5, No. 11
- Anasme, 2008. *Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat*. Tesis. Universitas Indonesia. Jakarta
- Bank Dunia. 2009. *Desentralisasi dan Pemerintah*. <http://www.worldbank.org>, 10 Januari 2014
- Ghozali, Imam, 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Mansim, Naftali, 2010. Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/kota di Papua Barat. *Jurnal Lensa Ekonomi* Vol.4. No.2
- Maryati, Ulfi dan Endrawati. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (OAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Sumatera Barat), *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Vol.5 Hal.68-84.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta : Andi Offset
- Republik Indonesia, *UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
 _____, *UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.

- _____, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 *Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengurusan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*
- _____, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK: 6/2007 Tahun 2007 *tentang Bagan Akun. Standar: Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.*
- _____, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*
- _____, Depdagri 1997, *Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*
- _____, UU No.17 Tahun 2003 *Tentang Keuangan Negara*
- _____, No. 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Rinawaty, Yulia, Nursini dan Agussalim. 2009. *Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah*. Program Pasca Sarjana Universitas Hasanudin. Makasar.
- Rostow dan Musgrave, 1996. *Pembangunan Ekonomi. Ekonomi Perencanaan Pembangunan*. Terjemahan oleh Drs. Benyamin Molan. 2008. Jakarta : PT. Raja Grafindo Pustaka
- Putra, Gathama, 2010. *Pengaruh Belanja Modal dan Belanja operasional terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah (2005-2008.)*. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Santosa, Budi. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan 33 Provinsi di Indonesia*. *Jurnal Keuangan & Bisnis*. Vol.5, No.2
- Setiyawati, Anis dan Hamzah, Ardi, 2013. *Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol.4, No. 2
- Sodik, Jamzani. 2007. *Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional : Studi Kasus Data Panel di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol.12 No.1
- Sukirno, Sudono. 2005. *Makroekonomi Modern. Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Sitaniapessy, Harry A. P. 2010. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB dan PAD*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol.10 No. 6
- Sriwahyuni, 2007. *Peran Krisis Ekonomi dalam Pengaruh Efektifitas dan Efisiensi Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Suatu Telaah Empirik di Kabupaten Karang Anyar)*. Tesis. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Sularso, Havid & Restianto, Yanuar (2011). *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah*, *Media Riset Akuntansi*, Vol.1, No.2
- Wahyuningsih, 2011. *Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia*. Tesis Program MPKP. Universitas Indonesia.
- Wood, L. 1998. *Local Government Dollars & Sense*, *Quarterly Journal of Economics*, Vol. 7, No.8
- www.bappenas.go.id
- www.bps.go.id
- www.djpk.go.id